



RENCANA KERJA 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat disusun tepat waktu dengan baik.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang telah disusun.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta ini, baik secara substansi perencanaan pembangunan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta penyesuaian dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam berkolaborasi guna membangun kota Jakarta yang kita cintai bersama ini.

Jakarta, Agustus 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



Benni Agusandra
NIP 196908081997031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Hingga tahun 2022, dunia secara global masih diliputi oleh pandemi Covid-19, di mana awal tahun 2020 merupakan saat pertama kali kemunculan Covid-19 di Indonesia. Sejumlah prosedur telah dilakukan pemerintah terkait penemuan kasus Covid-19 di Indonesia. Mulai dari mengisolasi rumah pasien, menjaga rumahnya hingga merawat pasien. Sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang mengacu kepada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditandatangani oleh Presiden RI.

Kondisi Pandemi Covid-19 ini berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga aspek sosial, aspek perekonomian dan aspek-aspek lainnya. Dari aspek perekonomian, dengan adanya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat, menyebabkan beberapa hal yakni penurunan pendapatan serta kemampuan membayar upah sehingga berlanjut penurunan daya beli masyarakat, kondisi yang tidak stabil juga mengakibatkan iklim investasi tidak baik karena tidak adanya kepastian usaha yang berimplikasi pada keberlangsungan usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Dinas yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penanaman modal turut andil dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 diantaranya pelaksanaan kebijakan pelayanan perijinan tanpa tatap muka melalui pengembangan layanan perijinan online dan implementasi kebijakan kemudahan berusaha terutama bagi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pelayanan relaksasi perijinan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan output layanan pada tahun 2021 menerbitkan 261.699 ijin IUMK.

Adapun capaian target sesuai dengan Indikator Kinerja yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022 dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Penanaman Modal ditargetkan sampai akhir periode tahun 2022 sebesar 541 triliun dan pada tahun 2021 telah tercapai sebesar 540,29 triliun atau tercapai 99,8 %
2. Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan sampai akhir periode tahun 2022 mendapatkan nilai 91,5 dan capaian hingga tahun 2021 telah mendapatkan nilai 90,09 atau tercapai 98,5%
3. Persentase layanan perijinan dan non perijinan secara online ditargetkan pada akhir periode tahun 2022 tercapai 100 persen dan pada tahun 2021 telah tercapai 100 persen.

Program dan indikator kinerja dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang mendukung Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing, Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan serta Peningkatan Fasilitas Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Indikator program Nilai kemudahan investasi
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator program Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta dan Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta
3. Program Pengendalian Penanaman Modal dengan Indikator program Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
4. Program Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Indikator Program Persentase penerbitan izin tepat waktu
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Indikator Program Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Indikator program Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah dengan Indikator program dengan indikator program Persentase Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mengacu RKPDP Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2023 dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 mendukung tercapainya Misi ke-2, yaitu "Perekonomian Inklusif Yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak Dan Pemerataan Kesejahteraan" dan Misi ke 4, yaitu Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu dan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta hasil pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang terdiri atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilengkapi dengan kinerja, indikator kinerja serta satuan.

Dengan harapan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam percepatan pencapaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPD 2023-2026.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	13
1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
1.4. <i>Review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD	39
1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	64
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	66
3.3. Program dan Kegiatan	68
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	98
4.1. Rencana Kerja, Target, dan Pendanaan	99
BAB V PENUTUP	107

- Lampiran I Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019
- Lampiran II Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s.d tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran III Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2019.
- Lampiran IV Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta.
- Lampiran V Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
- Lampiran VI Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran V Tabel 4.1 Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,
Sistematika Penulisan



1.1. Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023, untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

RPD Tahun 2023-2026 yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 sedangkan Renstra PD Tahun 2023-2026 yang disusun menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran serta prakiraan maju. Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada RKPD untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Renstra PD 2023-2026 dan RKPD 2023.

Sampai saat penyusunan RKPD 2023, kondisi Provinsi DKI Jakarta masih diselimuti dengan pandemi Covid-19. Harapan pandemi ini selesai di 2022 belum dapat terpenuhi. Bahkan seiring dengan waktu berlalu, para peneliti kesehatan menemukan bahwa muncul varian-varian baru dari Covid-19.

Selain masyarakat dibayang-bayangi ancaman Covid-19, pandemi Covid-19 secara tidak langsung juga menyerang aspek perekonomian masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terdampak dari sisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terganggu sehingga perlu dilakukannya penyesuaian belanja program dan kegiatan dengan tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mengacu pada RKPD- Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD-Tahun 2023. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya, target

kinerja tahun 2023 dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Normenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/ atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 104);
32. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
33. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
34. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);

36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);
38. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
39. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
40. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
41. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
42. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
43. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
44. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
45. Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020);
46. Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
47. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah;
48. Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
49. Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
50. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
51. Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Tipe III dan Tipe IV Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2023 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2023, tema pembangunan pada tahun 2023 adalah **“AKSELERASI KEUNGGULAN JAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA BERDAYA SAING GLOBAL YANG BERKETAHANAN, INKLUSIF DAN BERKEADILAN”**.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjabarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review Ranwal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi tentang garis besar rencana program dan prioritas Perangkat Daerah dalam Renja Tahun 2023.

BAB V : PENUTUP

Bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 yang berisi uraian catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU



Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review Ranwal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017-2022 terdapat 2 program dan 3 indikator kinerja utama yang menjadi target DPMPTSP, dan pada tahun 2020 Program yang diampu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami perubahan nomenklatur menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun realisasi Program dan Indikator yang diampu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

No	Program RPJMD	Program (Kemendagri 90)	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Program Peningkatan Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Realisasi investasi	Jumlah nilai penanaman modal asing (PMA) ditambah penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan BKPM.	*94 Triliun	98,6 Triliun	104.89%	Sangat Baik
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP mengacu pada PermenPAN & RB No 14/2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.	90 Indeks	107,97 Indeks	131.67%	Sangat Baik
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Jenis izin yang dilayani secara online / jumlah seluruh jenis izin *100%	100%	100%	100%	Sangat Baik

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

*Penyesuaian target sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas sebagai akibat pandemic Cov 19

2.1.1. Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja jumlah realisasi investasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 98,59 Triliun dari target sebesar 94 Triliun atau tercapai sebesar 104,88% dan masuk dalam kategori berhasil. Hal ini disebabkan membaiknya iklim penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sehingga memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta. Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program

pemerintah di bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan maka capaian indikator ini telah tercapai 85%.

2.1.1.1. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal.
- Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara online,
- Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan,
- Perbaikan dalam kebijakan *Ease Of Doing Business* (EODB) yang mempengaruhi investor dalam menginvestasikan dananya di Jakarta. Dalam rangka mendukung peningkatan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / *Ease Of Doing Business* (EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang mana di dalamnya terdapat keputusan bahwa meniadakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP DKI Jakarta dan selain itu untuk Penerbitan SIUP dan TDP dilakukan secara online dengan waktu penyelesaian 0,5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- Dikembangkannya *Jakarta Investment Center* (JIC) untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan segala informasi tentang investasi di Jakarta.
- Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta.
- Ditingkatkannya UMKM dengan melakukan kemudahan melalui relaksasi pemberian IUMK.
- Dikembangkannya pengintegrasian Sistem JakEvo-AJIB untuk mengatasi perizinan yang tidak dapat dilakukan secara online 100% karena beberapa hal yang harus tetap dijalani secara manual.

2.1.1.2. Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir.
- Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum tercapai.
- Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima informasi perubahan kebijakan yang telah dilakukan Pemda DKI Jakarta terkait *ease of doing business* (EODB).

- Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan.

2.1.1.3. Tindak lanjut tantangan :

- Melakukan pengkajian dan penelaahan atas adanya kebijakan yang baru agar dapat diimplementasikan.
- Menyederhanakan regulasi investasi dan atau penanaman modal serta melakukan sosialisasi regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
- Meningkatkan aktivitas promosi melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI) dan Bussines Forum.
- Mengoptimalkan fungsi JIC dalam rangka memperoleh informasi terkait proyek-proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
- Harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah.
- Penyusunan kebijakan dan disinsentif.
- Pengembangan kebijakan iklim penanaman modal sebagai agenda pemulihan ekonomi.
- Optimalisasi pengawasan dan fasilitasi penanaman modal.
- Self Awareness terhadap kebijakan EODB.
- Optimalisasi promosi investasi mewujudkan Jakarta sebagai destinasi investasi.
- Fasilitasi KPBU sebagai salah satu agenda *Creative Financing*

2.1.2. Indeks Tingkat kepuasan masyarakat

Indeks tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta karena merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja, dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Indeks tingkat kepuasan masyarakat diukur dengan cara melakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta pada pusat-pusat layanan baik dari tingkat Dinas, Kep. Seribu, Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan. Total unit layanan yang dievaluasi adalah sebanyak 310 layanan, yang terdiri dari 1 Dinas, 5 unit kota/ 1 Kab, 42 layanan kecamatan dan 261 unit kelurahan. Survey dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian wawancara langsung dengan masyarakat yang telah mendapatkan layanan secara paripurna dengan menggunakan kuesioner terstruktur (*Structured Quesionaire*).

Untuk perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan sekarang di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017, dimana terdapat 9 pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat, dengan unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan meliputi:

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan,

2. Kemudahan Prosedur Pelayanan,
3. Ketepatan Waktu Penyelesaian,
4. Kesesuaian Biaya,
5. Kesesuaian Peraturan (Hasil Pelayanan dengan Ketentuan yang ditetapkan),
6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan,
7. Sikap SETIA
8. Kualitas sarana dan prasarana dan
9. Kecukupan / keefektifan sarana informasi/pengaduan

Berdasarkan jawaban yang diterima dari responden tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel Nilai persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, sehingga bisa diketahui Mutu Pelayanan dan Kinerjanya.

Tabel 2.2 Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,53 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Untuk mengetahui gambaran hasil penelitian maka perlu dilakukan analisa hasil survei dengan mengelompokkan kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu tingkat Kota/Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan kemudian untuk Analisa data Provinsi, ditambahkan data Provinsi. Dengan demikian maka akan diketahui karakteristik masing-masing tingkatan, sehingga memudahkan para pengelola layanan mengetahui kekuatan dan kelemahan terhadap layanan yang diberikan kepada publik. Kemudian dari keempat tingkatan tersebut dihitung juga nilai IKM secara keseluruhan. Nilai IKM ini selanjutnya menjadi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Provinsi DKI.

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 90,09 dari target sebesar 90 atau tercapai sebesar 100% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 0,1% yakni dari 89,99 pada tahun 2021 menjadi 90,09 pada tahun 2021. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 102%.

2.1.2.1. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Biro ORB dan Kominfo memberikan dukungan penuh kepada DPMPSTP terkait pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

- Sarana Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sudah baik seperti kuesioner SKM sudah diintegrasikan dengan Sistem Jakevo, sehingga kuesioner secara otomatis muncul sebelum responden mendownload output perizinan/non perizinan.
- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Tersedianya sarana prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
- DPMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui harmonisasi peraturan dan penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui portal pelayanan.jakarta.go.id
- Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik sebagai one-stop service 328 perizinan dan pelayanan terpadu kerjasama pelayanan pemerintah pusat dan daerah.
- Tersedianya pelayanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas izin bagi pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus izin ke loket, semua jenis perizinan dan non perizinan dapat dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon harus sebagai pimpinan/karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo, selain itu dikembangkan pelayanan AJIB dengan Mobile Service Unit (MSU) sebanyak 3 unit yang dapat juga melayani perizinan dan non perizinan di lokasi tertentu. Jumlah jasa pengurusan melalui AJIB pada tahun 2021 secara keseluruhan 527.168 layanan.
- Tersedianya layanan Call Center DPMPTSP yang dapat diakses melalui sambungan telepon 021-1500164 untuk melayani informasi pengurusan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan masyarakat dan pemesanan layanan AJIB. Selama tahun 2021 Call Center DPMPTSP telah melayani sebanyak 90.465 layanan.
- Terobosan serta inovasi untuk kemudahan layanan perizinan dan non perizinan, antara lain :
 - a. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan mendukung Ketetapan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) maka telah dilakukan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atas permohonan perizinan dan/atau non perizinan dengan melakukan pengecekan pada basis data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui integrasi data dengan sistem yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan secara elektronik perlu dilakukan pemantauan terhadap seluruh aspek yang berpotensi menjadi

hambatan dalam teknis pelaksanaan untuk kemudian segera ditindaklanjuti. Sesuai dengan instruksi Kepala Dinas PMPTSP, bahwa sejak tanggal 18 Januari 2021, seluruh pelayanan perizinan dilakukan secara online dan dibantu juga oleh petugas AJIB. Sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan online 100% ini dibuat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik DPMPTSP. Untuk memperbaiki sistem pelaporan bulanan dari masing-masing service point, maka telah dibuatkan sebuah sistem pada website internalpelayanan.jakarta.go.id yang mana dari masing-masing service point melakukan rekap pelaporan pada sistem tersebut paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

- c. Bahwa untuk mendorong kemudahan dalam berinvestasi, pemberdayaan dan perlindungan ekonomi warga masyarakat, serta menindaklanjuti program Percepatan dan Relaksasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Mendorong Aktivitas Perekonomian pada Masa Pandemi Covid-19 perlu dilakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan perizinan. Sejalan dengan perubahan paradigma perizinan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai solusi atas banyaknya jumlah bangunan rumah tinggal eksisting tidak memiliki izin, permohonan perizinan yang tertunda cukup lama penyelesaiannya, kesulitan warga untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti proses perizinan terutama terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Maka dari itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 7 dimana penyelenggara PTSP wajib menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan, telah dikembangkan inovasi melalui aplikasi Jakevo yang menggunakan pendekatan baru dimana pemohon akan difasilitasi, didampingi, dan diberikan bantuan oleh petugas dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sejak tahap pra-permohonan. Sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut maka ditetapkanlah Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Eksisting Relaksasi.
- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- e. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pada penyelenggaraan pelayanan perizinan di Bidang Pekerjaan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 21

- Tahun 2021 tentang Standarisasi Perhitungan Nota Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (NPR IMB).
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 166 Tahun 2020 telah ditetapkan Izin Penyelenggaraan Tempat Uji Emisi, dalam rangka kemudahan dan percepatan pelayanan maka ketentuan sebagaimana pada keputusan tersebut perlu disempurnakan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Tempat Uji Emisi
 - g. Terhitung sejak hari Rabu, 29 April 2021, Penyelenggaraan Pelayanan Gambar Pra Perancangan Arsitektur yang menjadi kewenangan tingkat Dinas dan Kota/Kabupaten Administrasi dilakukan secara online. Dalam hal ini telah terintegrasi dengan pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mana telah ditetapkan dengan peraturan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian diperlukan penyederhanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi pada DPMPTSP dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1285 Tahun 2019 tentang Tim Evaluasi Perizinan Pemanfaatan Ruang, maka dikeluarkanlah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gambar Pra Perancangan Arsitektur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov DKI Jakarta Percepatan penyampaian laporan output perizinan bidang kesehatan berbasis elektronik (Silabik) di UP PTSP Kecamatan Taman Sari. Sistem pelaporan kesehatan berbasis elektronik mempercepat Dinas Teknis terkait (Suku Dinas Kesehatan) untuk mendapatkan data perizinan bidang kesehatan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sehingga memudahkan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengawasan Pengendalian (BINWASDAL)
 - h. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada UP PMPTSP sebagai dukungan percepatan pencapaian kemudahan berusaha bagi masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2021 ditetapkan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan serta sumber daya manusia pada service point pelayanan terpadu satu pintu sebagai implementasi sistem manajemen mutu dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19
 - i. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya serta telah berjalannya mekanisme pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko, maka ditetapkanlah Instruksi Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Layanan Perizinan Dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasca Implementasi Sistem OSS Berbasis Risiko
 - j. Dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian dan pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta akibat wabah Covid-19 maka dilakukan Percepatan dan Relaksasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

dengan sikap responsif, proaktif dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan.

- k. Penyelenggaraan Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam secara elektronik melalui web jakevo.jakarta.go.id dalam rangka efektivitas pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam.
- l. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan keserasian pola ruang area perencanaan dengan rencana kota disekitarnya pada perumahan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2021 tentang Pelayanan Konsultasi Rencana Pola Perpetakan pada Perumahan yakni kegiatan hunian berupa rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah flat.
- m. Percepatan pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah dilaksanakan dengan menyederhanakan prosedur dan persyaratan.
- n. Dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian pada masa pandemi Covid-19 maka perlu dilakukan Pelaksanaan Relaksasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- o. Dalam rangka penertiban dan pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Penanganannya yang sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan terhadap keterpaparan virus COVID-19 di DKI Jakarta dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dapat diakses secara elektronik melalui website corona.jakarta.go.id dan berlaku sejak tanggal 15 Mei 2021.
- p. Dalam rangka mendukung ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menanggulangi dampak status tanggap darurat bencana wabah Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta maka dilakukan Perpanjangan Masa Berlaku Dokumen Izin Tertentu di Bidang Kesehatan terkait penyebaran Covid-19.
- q. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja dalam peningkatan investasi, maka perlu adanya pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 23 bahwa Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) atas TKA yang dipekerjakan berupa retribusi daerah untuk Pengesahan RPTKA Perpanjangan di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut maka ditetapkanlah Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Validasi Pembayaran Notifikasi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing.

- r. Pembuatan kanal Sistem Informasi Kotak Aspirasi (SIKOPI) pada web internalpelayanan.jakarta.go.id sebagai sarana komunikasi pengumpulan fakta-fakta lapangan yang diharapkan dapat mendekatkan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan implementasi pelaksanaan layanan tersebut di lapangan. Selain itu, melalui hal tersebut diharapkan juga agar ditemukannya permasalahan-pemmasalahan baru yang tersembunyi dari perspektif manajemen atau pejabat yang berwenang, sehingga dapat menghasilkan capaian yang maksimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat berdasarkan *evidence based*.

2.1.2.2. Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Adanya pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
- Adanya perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu penyesuaian.
- Masih adanya anggapan bahwa layanan perizinan dan non perizinan sulit dan rumit.
- Masih terdapat rekomendasi dari SKPD teknis terhadap perizinan dan non perizinan yang melebihi batas waktu
- Kebutuhan SDM Teknis masih ada kekurangan.

2.1.2.3. Tindak lanjut tantangan :

- Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP terkait diagendakan secara terjadwal serta melibatkan stakeholder terkait.
- Pembuatan program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan izin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungli.
- Perlu dikembangkan aplikasi pemberian rekomendasi secara online (e-rekomtek)
- Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.

2.1.3. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online

Layanan perizinan dan non perizinan online dikembangkan untuk memastikan masyarakat memperoleh jaminan pelayanan sesuai dengan SOP, yakni jaminan prosedur, syarat, waktu dan biaya. Selain itu dengan adanya layanan online diharapkan mampu mengurangi jumlah calo yang merugikan pemohon. Capaian persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online tahun 2021 adalah 100%.

2.1.3.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah:

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pengembangan layanan perizinan dan non perizinan secara online.
- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh SDM DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Dukungan dari SKPD teknis terkait yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta dalam rangka pengembangan sistem online berupa pemberian rekomendasi.

- Tersedianya SOP yang lengkap terkait perizinan dan non perizinan sebagai dasar pembuatan bisnis proses pengembangan sistem online.

2.1.3.2. Tantangan pencapaian indikator

- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP untuk terus mengembangkan sistem online layanan perizinan dan perizinan yang lebih cepat dan akomodatif terhadap kebutuhan pemohon.

2.1.3.3. Tindaklanjut Tantangan

- Dukungan dari seluruh bidang terkait updating informasi mengenai perubahan SOP sehingga dapat langsung diakomodir dalam sistem online.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Renstra Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2022)	Realisasi Kinerja Renja Triwulan 1	Tingkat Capaian Kinerja Renstra tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2:18:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
	2:18:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
	2.18.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks kepuasan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	4 Indeks	5 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sekretariat, Bid. Pengembangan
	2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai kepuasan peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	15 kali	6	4 Nilai	4 Nilai	100%	Sekretariat
	2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	16	8	4 Laporan	1 Laporan	100%	Bid. Pengembangan
	2.18.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan</i>			4 Indeks	4	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
	2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100%	100%	100%	Sekretariat
	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	60	36	4 Indeks	100%	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
	2.18.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum</i>			4 Indeks	4 Indeks	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan peralatan dan	60	36	4 Nilai	4 Nilai	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

			perlengkapan kerja serta alat tulis kantor						
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Nilai Kepuasan Pelayanan Terhadap Kebutuhan kantor Cetak dan Penggandaan	60	36	4 Nilai	4 Nilai	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah KDO yang berfungsi/dapat digunakan	670.450	402.270	370 Unit	50	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan fasilitas kunjungan tamu/makan minum tamu	60	36	4 Nilai	4 Nilai	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			4 Indeks	4 Indeks	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase penyelesaian administrasi surat-menyerurat/caraka dan sopir	75.000	36.103	100%	100%	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Nilai kepuasan pelayanan Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	48	24	4 Nilai	4 Nilai	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi	338	738	4 Nilai	4 Nilai	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan kinerja petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan			4 Laporan	1 Laporan	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Keamanan Kantor dan Jasa Pembuangan Sampah	48	24	4 Nilai	4 Nilai	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan kantor/Lapangan	25	62	4 Nilai	4 Nilai	100%	Sekretariat
2.18.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan</i>			4 Indeks	4 Indeks	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO/KDO Khusus yang dipelihara dan memiliki surat izin	355	1.080	370	50	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara	60	36	91 Unit	6	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan layanan kebersihan kantor	37	62	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sekretariat, UP PMPTSP Kota/Kabupaten
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1	2	1	0 (Blm ada target)	100%	Sekretariat
B.X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan terhadap pelayanan terhadap penyediaan rumah dinas	60	36	4 Indeks	4 Indeks	100%	UP PMPTSP Kabupaten Kep. Seribu
2.18.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit lift yang laik jalan/berfungsi	4	8	4 Unit	0 (Blm ada target)	100%	Sekretariat
2.18.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan layanan terhadap genset kantor	48	24	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sekretariat
2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah APAR yang berfungsi dengan baik	36	93	57 Unit	0 (Blm ada target)	100%	Sekretariat
2:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal			100%	0	100%	Bid. Penanaman Modal
2.18.02.1.01	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah kebijakan penanaman modal yang ditetapkan</i>			1 Kebijakan	0 (Blm ada target)	-	Bid. Penanaman Modal
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah regulasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang disusun	5	15	5 Jenis	0 (Blm ada target)	-	Bid. Penanaman Modal
2.18.02.1.02	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</i>	<i>Jumlah Laporan terkait potensi investasi di Provinsi DKI Jakarta</i>			1 Laporan	0 (Blm ada target)	-	Bid. Penanaman Modal
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Laporan Upaya Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif	1		1 Laporan	0 (Blm ada target)	100%	Bid. Penanaman Modal
2:18:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan pelaksanaan promosi daerah			80	<i>0 (Blm ada target)</i>	100%	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Efektivitas Hasil Promosi Penanaman Modal			1 Laporan	0 (Blm ada target)	100%	UPT JIC
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Laporan pelaksanaan riset promosi investasi daerah	4		1 Laporan	0 (Blm ada target)	100%	UPT JIC
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Laporan penyelenggaraan Jakarta Investment Center	48	24	4 Laporan	1 Laporan	100%	UPT JIC
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Laporan pelaksanaan promosi penanaman modal	4	23	4 Laporan	1 Laporan	100%	UPT JIC
2:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Produktivitas Pelayanan DPMPTSP			82 indeks	0 (Blm ada target)	100%	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	4	8	4 Laporan	1 Laporan	100%	Bid. Pelayanan II
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			100%	100%	100%	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah laporan pelayanan izin Bidang Ketataruangan	100	200	4 Laporan	1 Laporan	100%	Bid. Pelayanan II
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan peningkatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan	200	400	4 Laporan	1 Laporan	100%	Sekretariat
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan petugas CRO atas peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu	300	600	4 Laporan	1 Laporan	100%	Sekretariat
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Laporan pengelolaan call center	48	24	4 Laporan	1 Laporan	100%	Bid. Penyuluhan dan Pengaduan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

		terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan							
2.18.04.1.02.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rasio berita positif terhadap pelayanan DPMPSTSP	9	16	9	9,8	100%	Bid. Penyuluhan dan Pengaduan
2.18.04.1.02.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	100	200	100%	100%	100%	Bid. Penyuluhan dan Pengaduan
2.18.04.1.02.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah ISO yang diterapkan	4	2	1 ISO	0 (Blm ada target)	100%	Bid. Pengembangan
2.18.04.1.02.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah regulasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang disusun			5 Jenis	1 Jenis	100%	Bid. Pengembangan
2.18.04.1.02.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan Pelaksanaan simplifikasi perizinan dan non perizinan			4 Laporan	1 Laporan	100%	Bid. Pengembangan
B.2.18.04.2.01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nilai Kepuasan penyelenggaraan pelayanan terpadu keliling di wilayah kepulauan seribu	48,0	12	27 laporan	4 Nilai	100%	UP PMPTSP Kabupaten.Kep.Seribu
2:18:05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase permasalahan yang dihadapi perusahaan debottlenecking			100%	26%	100%	Bid.Penanaman Modal
2.18.05.1.01		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah perusahaan yang termasuk dalam daftar pengendalian pelaksanaan penanaman modal</i>			2000 Perusahaan	500 Perusahaan	100%	Bid.Penanaman Modal
2.18.05.1.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian penanaman modal	5,0	15	4 Laporan	1 Laporan	100%	Bid.Penanaman Modal
2.18.05.1.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Fasilitas Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	1	1	3 Laporan		100%	Bid.Penanaman Modal

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

2:18:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Produktivitas Sistem Data dan Informasi			84 Indeks	0 (Blm ada target)	100%	UP Pusdatin
2.18.06.1.01	<i>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi Untuk Peningkatan Pelayanan Publik</i>			4 Laporan	<i>1 Laporan</i>	100%	UP Pusdatin
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase sarana dan prasarana TI untuk peningkatan pelayanan publik dikelola dengan baik	324	586	100	100	100%	UP Pusdatin
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik yang dikembangkan	100	191	4 Sistem	0 (Blm ada target)	100%	UP Pusdatin
4:01:03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Jumlah proyek yang disiapkan			4 Laporan	1 Laporan	100%	UPT JIC
4.01.03.1.03	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	<i>Laporan persiapan proyek</i>			4 Laporan	1 Laporan	100%	UPT JIC
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah laporan persiapan proyek dan atau potensi proyek strategis daerah yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha	16	4	4 Laporan	1 Laporan	100%	UPT JIC

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

2.2.1. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Provinsi DKI Jakarta, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Perubahan Kebijakan dari pemerintah pusat (antara lain UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan OSS) memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak segera dapat direalisasikan oleh daerah; ➢ Meningkatnya target indeks kepuasan masyarakat dan masih terdapat ketimpangan nilai kualitas layanan diantara UPPMPTSP Kelurahan Kecamatan maupun Kota ; ➢ Peningkatan Kualitas mal pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Respon daerah terhadap kebijakan pusat harus disikapi melalui pengkajian dan telaah mendalam untuk disesuaikan sehingga dapat diimplementasikan daerah dalam bentuk kebijakan atau aturan yang baru atau pendukung lainnya; ➢ Identifikasi kelebihan dan kekurangan melalui survey kepuasan publik yang biasanya dilakukan berkala, kemudian dibuat program atau kegiatan untuk meningkatkan hal yang sudah dianggap baik dan memperbaiki yang yang masih kurang baik; ➢ Pelaksanaan Monitoring layanan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan di seluruh unit layanan ➢ Melakukan peningkatan kualitas Mal Pelayanan Publik
Penanaman modal dan Jakarta Investment Centre	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Iklim investasi global yang mempengaruhi banyaknya investor dalam menginvestasikan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan investor dan

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<p>dananya di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi; ➢ Promosi investasi daerah belum optimal sehingga Jakarta belum menjadi Brand Tujuan Investasi Nasional; ➢ Terbitnya Undang-Undang no 11 tahun 2020 	<p>menarik investor untuk investasi di Provinsi DKI Jakarta;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan promosi dalam upaya menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta ➢ Kajian parsial dan komprehensif terhadap trend atau kecenderungan investasi global, nasional, dan regional; ➢ Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha bagi calon investor ➢ Aktivitas promosi perlu ditingkatkan melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI); Iklan Media (media berbayar, milik sendiri, media sosial); Selling atau Jemput Bola; ➢ Jakarta Investment Center perlu didorong lebih aktif dan proaktif menjadi bagian dari promosi Jakarta untuk menciptakan Brand Jakarta sebagai Tujuan Investasi Nasional; ➢ Dibuat forum bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten; ➢ Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<p>tentang Cipta Kerja beserta turunannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perubahan Regulasi investasi dan atau penanaman modal dikhawatirkan akan memberikan persepsi ketidak pastian dalam berusaha (iklim investasi); ➤ Peningkatan kapasitas SDM DPMPSTSP baik tingkat kelurahan, Kecamatan kota dan Dinas dalam kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah; ➤ Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM; ➤ Jakarta Investment Center belum berjalan secara optimal 	<p>diimplementasikan daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Disederhanakannya regulasi investasi dan atau penanaman modal; ➤ Sosialisasi regulasi harus mempunyai agenda terjadwal yang diinisiasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dengan narasumber kompeten; ➤ Panduan standarisasi kompetensi SDM terkait investasi dan atau penanaman modal; ➤ Pelatihan pendukung guna meningkatkan kompetensi yang diagendakan terjadwal; ➤ Diklat, sosialisasi, seminar, <i>Coffee Morning</i> serta pelaksanaan <i>JIC Talks</i> yang membahas informasi terbaru tentang investasi baik regulasi, trend, dan hal terkait lainnya; ➤ Perlu ada sosialisasi akan pentingnya LKPM bagi investor; ➤ Perlu dibuat aturan yang mengatur pelaporan LKPM; ➤ Perlu ditetapkan sistem reward dan punishment untuk pelaporan LKPM oleh investor; ➤ Peningkatan peran dan fungsi Unit Kota dan Kecamatan dalam fungsi pengendalian Penanaman Modal ➤ Mengoptimalkan Jakarta Investment Center sebagai pusat kegiatan dalam melakukan

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jangka waktu umur proyek yang sangat Panjang sementara masa pemerintahan hanya lima tahun membuat calon investor tidak memiliki kepastian terhadap keberlangsungan dari program ini ➤ Kesulitan dalam memasarkan dan menawarkan proyek-proyek KPDBU karena informasi terkait proyek KPDBU tidak tersebar secara sempurna ➤ Perencanaan yang baik dalam penentuan proyek KPDBU untuk mengurangi potensi proyek mangkrak dan gagal 	<p>investasi dan penanaman modal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelibatan dan koordinasi dengan semua instansi terkait untuk menjaga iklim investasi yang kondusif serta aktivitas program kerja bersama; ➤ Menyakinkan calon investor bahwa program ini memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak bergantung terhadap masa pemerintahan Gubernur ➤ Membuat media promosi secara online sehingga informasi bisa tersebar ke semua calon investor ➤ Pelibatan para ahli di Bidangnya dalam melakukan penilaian proyek KPDBU
<p>Pengaduan dan Penyuluhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan dari pemilik ijin sebagai akibat adanya pelanggaran ketentuan (misal: tuntutan dicabutnya ijin karena pelanggaran dibidang pariwisata/spa/panti pijat/ hiburan malam dan sebagainya); 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dibuatnya aturan yang jelas termasuk sistem reward dan punishment terkait kepatuhan ijin usaha; ➤ Dibuat panduan tahapan pencabutan ijin usaha akibat adanya pelanggaran ketentuan; ➤ Sosialisasi berkala terhadap aturan dan tahapan pencabutan ijin usaha terhadap pemilik ijin usaha agar mematuhi ketentuan dan kesepakatan atas pemberian ijin usaha;

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan karena pencabutan ijin sebagai akibat adanya perubahan kebijakan tata ruang; ➤ Belum tersedianya SDM sesuai bidang kerja pengaduan dan komunikasi masyarakat; ➤ Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP; ➤ Peningkatan kualitas dari Kontain media sosial milik DPMPTSP; ➤ Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dibuatnya aturan yang mengatur kewenangan terkait pengalihan dan atau kemungkinan pencabutan ijin usaha atau pemindahan ijin usaha sebagai akibat perubahan kebijakan tata ruang; ➤ Sosialisasi RTRW dan aturan terhadap adanya kewenangan pemerintah provinsi untuk mengalihkan dan atau kemungkinan mencabut ijin usaha karena perubahan kebijakan tata ruang; ➤ Identifikasi kebutuhan SDM (jurusan komunikasi dan hukum) lalu menyusun panduan kompetensi teknis serta melakukan perekrutan terkait kebutuhan bidang pengaduan dan masyarakat; ➤ Pelatihan pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan; ➤ Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus mempunyai agenda terjadwal dan bersifat segera serta diinisiasi pemerintah daerah melalui DPMPTSP; ➤ Terus melakukan update informasi, berita, prestasi atau penghargaan, inovasi, peraturan dan hal terkait lainnya dengan media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya;

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<p>ijin sulit dan adanya konten negatif lain terkait DPMPTSP;</p>	<p>➤ Dibuat program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan ijin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungutan, dan hal positif lainnya;</p>
Pelayanan	<p>➤ Langkah atau upaya tindak lanjut setelah seluruh layanan bersifat online;</p> <p>➤ Perubahan kebijakan baik terkait aktivitas investasi, tata ruang, dan kebijakan lain;</p> <p>➤ Kebutuhan SDM teknis yang masih kurang;</p>	<p>➤ Perlu diinisiasi (melalui kajian ilmiah, seminar, talk show, dan narasumber) terhadap peran AJIB dan CRO agar menjadi lebih optimal ketika seluruh layanan sudah online;</p> <p>➤ Dibuat sosialisasi terkait perubahan kebijakan baik dengan seminar, talk show, temu ilmiah, kajian, dan diskusi narasumber;</p> <p>➤ Pemetaan kebutuhan SDM dan penyusunan standarisasi kompetensi teknis SDM yang dapat menjadi panduan proses rekrutmen pegawai;</p> <p>➤ Rekrutmen pegawai menyesuaikan kebutuhan dan standar kompetensi teknis;</p>
Sekretariat	<p>➤ Masih belum tercukup sarana prasana di lingkup DPMPTSP</p> <p>➤ Belum seragamnya pemahaman SDM mengenai standarisasi administrasi keuangan;</p> <p>➤ Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK;</p>	<p>➤ Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana prasarana;</p> <p>➤ Pelatihan berkala terhadap peningkatan kapasitas staf administrasi keuangan;</p> <p>➤ Diklat, seminar, atau Coffee Morning yang membahas informasi dan perkembangan terbaru mengenai administrasi keuangan;</p>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian belum menjadi prioritas; ➤ Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan setiap unit tidak sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dimohon; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK; ➤ Dibuat kesepakatan dan kesepakatan bersama terhadap pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian; ➤ Pemetaan kebutuhan SDM setiap unit layanan serta panduan standarisasi kompetensi yang diperlukan untuk menunjang tupoksi setiap unit layanan; ➤ Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompetensi untuk menunjang aktivitas unit layanan atau bidang; ➤ Dilakukan rekrutmen PJLP guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang; ➤ Dilakukan rekrutmen pegawai kontrak atau penambahan formasi PNS kedepan khusus untuk bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan atau sistem teknologi informasi;
<p>Pusat Data dan Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kemandirian DPMPTSP dalam mengembangkan sistem pelayanan online 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mempercepat proses pengembangan untuk mendukung kemandirian melalui proses “<i>transfer knowledge</i>” keahlian pengembangan sistem dengan mendatangkan

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Target sistem pelayanan online belum mencapai 100%; ➤ Belum tersedianya SDM IT yang cukup di lingkungan DPMPTSP; 	<p>pakar atau ahli dibidangnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengakomodasi perubahan sebagai bagian dari penyesuaian era ekonomi digital dengan proses belajar, kajian independen, <i>lesson learned</i>, konsultasi ahli / narasumber, kunjungan lapangan, dan aktivitas pendukung lain; ➤ Diperlukan inovasi yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital dengan beberapa penyesuaian terutama penggunaan layanan berbasis aplikasi untuk menunjang layanan capaian layanan 100% online; ➤ Identifikasi dan pembuatan panduan teknis terkait standar kompetensi SDM di bidang ini; ➤ Pengadaan kebutuhan SDM sesuai standar kompetensi teknis;
<p>UPPMPTSP Kota/Kecamatan/Kelurahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pesebaran sarana prasana yang standar belum merata ➤ Pemenuhan SDM baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana prasarana; ➤ Pengadaan Sarana Prasarana Sesuai KEbutuhan Unit ➤ Pemetaan kebutuhan SDM dan penyusunan standarisasi kompetensi teknis SDM yang dapat menjadi panduan proses rekrutmen pegawai; ➤ Rekrutmen pegawai menyesuaikan kebutuhan dan standar kompetensi teknis;

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Perubahan kebijakan yang membutuhkan respon cepat seringkali terlambat tersampaikan secara merata ke unit, sehingga seringkali terdapat perbedaan kebijakan layanan di masing-masing unit ➢ Penguatan fungsi Penanaman Modal di Unit Kota/Kecamatan dan Kelurahan belum sepenuhnya dipahami unit layanan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dilakukan rekrutmen PJLP guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang; ➢ Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompetensi untuk menunjang aktivitas unit layanan ➢ Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus mempunyai agenda terjadwal dan bersifat segera serta dapat diinisiasi oleh bidang terkait ➢ Pemanfaatan teknologi informasi dan penyiapan call center khusus untuk pelayanan internal kebijakan ➢ Diselenggarakan sosialisasi, bimtek, diklat terkait fungsi penanaman modal bagi unit terkait guna meningkatkan kompetensi;

Sumber : Hasil Wawancara, Diskusi, dan Dokumen Pendukung Diolah

2.2.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penanaman modal melebihi dari target yang telah ditentukan, serta pelaksanaan sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa program internal sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Kemajuan di bidang hukum dan perundang-undangan sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan diterbitkan beberapa peraturan yang mendukung kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, isu-sisu strategis yang menjadi fokus DMPTSP pada periode 2023 – 2026 mencakup:

1. Perbaikan iklim penanaman modal yang diharapkan mampu meningkatkan realisasi investasi di DKI Jakarta
2. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam upaya pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang diupayakan melalui Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB):

1. Menyederhanakan prosedur izin konstruksi;
2. Melakukan percepatan waktu proses perizinan penataan ruang dan bangunan;
3. Menyederhanakan proses pendaftaran properti untuk usaha; dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui automasi (elektronifikasi) perizinan maupun non perizinan dengan target 100,00% menjadi berbasis elektronik.

Optimalisasi Mal Pelayanan Publik melalui Peningkatan Peran Jakarta Investment Center (JIC) dalam Peningkatan Investasi

1. Menyelenggarakan kegiatan Jakarta Investment Forum sebagai wadah atau fasilitasi setiap stakeholder;
2. Memberikan kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan atau investor dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; dan
3. Mengembangkan 2 (dua) fitur layanan investasi antara lain website Invest Jakarta dan Jakarta Virtual Consultant for Business

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				718,468,558,755	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				721.186.505.411	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	538,213,028,631	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	543.145.489.807	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	107,921,496	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	107,921,496	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	107,921,496	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	107,921,496	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	496,988,876,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	501.870.306.779	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1317 Orang	435,631,930,492	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1317 Orang	501.852.944.159	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	7 Dokumen	17,362,620	Pelaksanaan Penatausahaan dan	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	7 Dokumen	17.362.620	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	5,573,694,577	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	5.175.046.402	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	168,878,898	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	168.878.898	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2,649,540,696	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.649.540.696	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	197,092,601	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	197,092,601	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	158,569,272	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	158,569,272	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	101,674,779	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	101,674,779	
	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1,353,307,500	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1,353,307,500	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	168,297,956	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	168,297,956	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKP					Rancangan Akhir RKP					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	279,150,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	279,150,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	98,534,700	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	98,534,700	
	Pengadaan Mebel	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	98,534,700						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	16,333,639,955	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	17.372.794.205	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,103,935,284	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.143.089.534	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	6.203.734.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	6.203.734.500	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	25,970,171	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	25,970,171	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	2.503.838.718	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	2,503,838,718	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit	790,951,046	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit	790,951,046	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	216,806,166	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	216,806,166	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,406,632	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,406,632	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,445,674,874	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,445,674,874	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	16,077,683,885	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	16.115.582.207	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3,488,650,550	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3,488,650,550	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3,320,071,927	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3,320,071,927	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,319,025,320	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.368.988.640	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	6,949,936,088	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	6.937.871.090	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Nilai kemudahan investasi	72,5 Nilai	977,650,000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Nilai kemudahan investasi	72,5 Nilai	811.000.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu	100%	977,650,000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang		811.000.000	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								disusun tepat waktu			
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	977,650,000	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	811.000.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta, Luar daerah dan Luar Negeri	-Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta -Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	100% 100%	7,888,160,556	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta, Luar daerah dan Luar Negeri	-Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta -Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	100% 100%	7,888,160,556	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	16 Proyek	7,888,160,556	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	16 Proyek	7,888,160,556	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	DKI Jakarta, Luar daerah dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	7,888,160,556	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	DKI Jakarta, Luar daerah dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	7,888,160,556	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	60%	1,423,044,972	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	60%	1,423,044,972	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1200 Perusahaan	1,423,044,972	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1200 Perusahaan	1,423,044,972	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	16 Kegiatan Usaha	545,400,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	16 Kegiatan Usaha	545,400,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	422 Pelaku Usaha	172,494,297	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	422 Pelaku Usaha	172,494,297	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	23 Kegiatan Usaha	705,150,675	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	23 Kegiatan Usaha	705,150,675	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100%	153,787,305,481	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100%	153,787,305,481	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Laporan	153,787,305,481	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Laporan	153,787,305,481	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	11366 Pelaku Usaha	142,139,149,382	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	11366 Pelaku Usaha	142,139,149,382	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	73536 Pelaku Usaha	11,648,156,099	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	73536 Pelaku Usaha	11,648,156,099	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	87 Indeks	14,131,504,595	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	87 Indeks	14,131,504,595	
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Sistem yang Dikembangkan	3 Sistem	14,131,504,595	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Sistem yang Dikembangkan	3 Sistem	14,131,504,595	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	14,131,504,595	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	14,131,504,595	
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH					URUSAN SEKRETARIAT DAERAH					

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	DKI Jakarta	Persentase Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	100%	2,047,864,520	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	DKI Jakarta	Persentase Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	100%	2,047,864,520	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Proyek yang Difasilitasi dengan Skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usahan	3 Proyek	2,047,864,520	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Proyek yang Difasilitasi dengan Skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usahan	3 Proyek	2,047,864,520	
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	DKI Jakarta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	4 Dokumen	2,047,864,520	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	DKI Jakarta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	4 Dokumen	2,047,864,520	
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5,194,515,031	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.179.047.782	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	5,194,515,031	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	5.179.047.782	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 indeks	3,699,940,127	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan	4 indeks	3.678.940.580	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	3,699,940,127	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	3.678.940.580	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 indeks	466,122,239	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 indeks	471.645.084	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	364 Unit	236,249,849	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	364 Unit	238.230.599	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	229,872,390	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	233.414.485	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 indeks	1,026,065,665	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 indeks	1.026.077.318	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97,237,360	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	98.118.783	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	29,618,400	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.782.230	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	871,520,155	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	879.259.361	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27,689,750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.916.944	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	2,387,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	2.384.800	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2,387,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.384.800	
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4,382,867,770	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.066.971.289	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4,382,867,770	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4.066.971.289	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1,110,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1.098.900	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	1,110,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	1.098.900	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1,253,011,207	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	952.899.016	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	835,213,273	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	835.208.691	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51,643,388	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51.626.677	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	366,154,546	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	66.063.648	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	2,743,059,182	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	2.727.490.430	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	2,743,059,182	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	2.727.490.430	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	385,687,381	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	385.482.943	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	295 Unit	143,300,611	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	295 Unit	143.135.278	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	242,386,770	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	242.347.665	
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6,544,971,958	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.131.283.409	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	6,544,971,958	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	6.131.283.409	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	2,015,600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	2.000.000	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	2,015,600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	2.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1,159,020,195	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1.078.919.044	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	796,163,720	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	822.633.277	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	106,205,440	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.694.983	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	199,959,375	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	98.661.018	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	38.429.766	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	56,691,660	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	19.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4,850,405,550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan	4 Indeks	4.502.260.700	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	4,850,405,550	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	4.502.260.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	533,530,613	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	548.103.665	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit	305,314,130	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit	308.664.743	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	228,216,483	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	239.438.922	
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6,602,343,329	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.706.121.333	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	6,602,343,329	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan	4 Indeks	1.110.000	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Pemerintahan Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1,100,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1.110.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	1,100,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	1.110.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1,123,582,615	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1.140.703.216	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	938,673,577	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	953.597.287	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	96,162,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.552.350	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	31,460,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	31.746.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	57,287,038	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	57.807.579	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	5,167,157,994	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	5.137.830.810	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	5,167,157,994	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	5.137.830.810	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	310,502,720	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	426.477.307	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	332 Unit	202,410,065	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	332 Unit	203.766.740	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	108,092,655	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	222.710.567	
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6,542,344,617	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.556.150.179	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	6,542,344,617	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	6.556.150.179	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1,100,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1,100,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	1,100,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	1.100.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1,062,933,561	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1.112.398.962	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92,026,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.552.350	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	27,800,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	27.800.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	879,667,855	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	921.425.565	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37,951,100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	39.900.726	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Penggandaan yang Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,488,606	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.720.321	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	5,167,157,994	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	5.137.830.810	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	5,167,157,994	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	5.137.830.810	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	311,153,062	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	304.820.407	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	75,050,932	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	66.571.894	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	236,102,130	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	238.248.513	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1,901,153,319	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.884.384.518	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	1,281,119,775	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	1.264.354.802	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1,500,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1.500.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	1,500,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	1.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	269,846,324	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	269.780.128	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	180,287,932	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	180.285.778	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	48,225,276	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	48.224.550	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	41,333,116	Fasilitas Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	41.269.800	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	132,372,724	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	131.751.095	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	132,372,724	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	131.751.095	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	777,138,840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	761.160.120	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	777,138,840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	761.160.120	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	100,261,887	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	100.163.459	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	100,261,887	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	100.163.459	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKP					Rancangan Akhir RKP					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100%	620,033,544	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100%	620.029.716	
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		620,033,544	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		620.029.716	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	11366 Pelaku Usaha	620,033,544	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	11366 Pelaku Usaha	620.029.716	
					680,636,971,448					749,016,721,235	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi, lembaga penelitian, akademisi maupun dari perangkat daerah dari Provinsi hingga kabupaten/kota yang disampaikan secara langsung maupun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat Provinsi.

Seluruh data aspirasi dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui proses Musrenbang telah difasilitasi melalui sistem teknologi informasi yang dapat diakses melalui portal musrenbang.jakarta.go.id. Berdasarkan penarikan data pada sistem tersebut terdapat satu usulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	NIHIL	-	-

*

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan



2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

2.1.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

2.1.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

RKP 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu:

- (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
- (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;
- (4) mendorong pemulihan dunia usaha;
- (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
- (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen, Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen, Rasio Gini 0,375–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen, Nilai Tukar Petani 103–105, dan Nilai Tukar Nelayan 106–107. Perkembangan jumlah kasus Covid-19 di tanah air menunjukkan kecenderungan yang terus menurun dan terkendali. Berbagai indikator penting pembangunan juga terus menunjukkan perbaikan. Hal ini membangkitkan optimisme bagi kita semua untuk melakukan percepatan pemulihan dan tumbuh sehingga mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan Prioritas penyusunan Rencana Kerja harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 arahan utama Presiden yakni:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan dalam rangka mendukung 5 arahan tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan..
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Merujuk kepada 7 agenda pembangunan dan sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta selaku pengembang urusan Penanaman Modal terlibat dalam agenda Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas berkeadilan dan agenda ini diturunkan melalui program prioritas Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi dengan kegiatan prioritas peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar, serta program prioritas Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi dengan prioritas kegiatan Perbaikan Iklim Usahan dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penusunan Renja DPMPSTSP tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan penanaman modal yakni dengan indikator tercapainya target realisasi penanaman modal dengan target sebesar 1.200 triliun target nasional dan akan dilakukan penyesuaian apabila ada arahan lebih lanjut dari Presiden.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja merujuk kepada Rencana Strategis Tahun 2023-2026, adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Pembangunan Kota

Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Pembangunan Kota diukur melalui Indikator **Realisasi Investasi**. Realisasi nilai investasi adalah nilai penanaman modal baik penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta. Nilai realisasi investasi diperoleh dari perhitungan jumlah nilai penanaman modal asing (PMA) ditambah penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta. Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.

Dalam rangka meningkatnya kualitas iklim penanaman modal untuk mendukung pembangunan kota maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan sasaran Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing dengan indikator **Score of Business Enabling Environment**. Score of Business Enabling Environment adalah perhitungan mandiri tentang daya tarik investasi di DKI Jakarta dengan menggunakan beberapa indikator dalam kerangka regulasi, penyediaan layanan publik dan kombinasi keduanya sehingga akan memberikan nilai

tambah dalam konteks data yang lebih luas dan analisis iklim penanaman modal. Diukur melalui hasil survey kepada stakeholder terkait, yang dihitung dengan menggunakan beberapa indikator antara lain: kemudahan akses perizinan, lama waktu perizinan, kemudahan akses informasi investasi, kemudahan perpajakan, dukungan infrastruktur. Hasil diwujudkan dalam skala: Kurang Menarik : <51,0 Cukup Menarik : 51,1 - 61,0 Menarik : 61,1 - 80,0 Sangat Menarik : >80,1.

2. Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan

Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan diukur melalui **Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu**. Mengacu pada PermenPAN & RB No 14/2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara daring penuh melalui sistem perijinan. Pelaksanaan SKM dilakukan secara daring melalui sistem jakevo.jakarta.go.id (kuesioner elektronik) setelah pemohon memperoleh izin/non izin dan bersifat non mandatory (tidak wajib mengisi).

Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan melalui media daring sehingga dalam menyusun rangka pencapaian tujuan Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizina dirumuskan sasaran Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan dengan indikator **Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online**. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan. Izin yang Diterbitkan Secara Online adalah penerbitan izin yang menggunakan sistem perizinan dan nonperizinan.

3. Terlaksananya Pengembangan Kemitraan Pembangunan Kota

Dalam rangka pendanaan pembangunan kota melalui pembiayaan lain diluar APBD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 160 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku sekretariat simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) maka perlu dirumuskan satu tujuan yakni Terlaksananya Pengembangan Kemitraan Pembangunan Kota dengan indikator **Persentase Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Terfasilitasi**. Persentase Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Terfasilitasi adalah Jumlah usulan rencana proyek KPDBU yang masuk ke Simpul KPDBU (Solicited dan Unsolicited) yang difasilitasi dibandingkan jumlah seluruh proyek KPDBU yang masuk ke Simpul KPDBU (Solicited dan Unsolicited). Adapun sasaran yang dirumuskan adalah Peningkatan Fasilitasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dengan indikator **Persentase Proyek KPDBU dengan Orientasi Value for Money**, Proyek KPDBU dengan Orientasi Value for Money adalah: 1. Mengutamakan rencana proyek KPDBU dengan mekanisme pengembalian user charge. 2. Untuk mekanisme pengembalian Availability Payment akan diproses sampai tahapan penyiapan, untuk tahapan lelang akan diproses menyesuaikan dengan kondisi Fiskal di DKI Jakarta.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Pembangunan Kota		Realisasi Nilai Investasi	114 Triliun	120 Triliun	126 Triliun	132 Triliun
		Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing	Score of Business Enabling Environment	71.69	73.84	76.05	80.01
2	Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan		Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu	90.09	91	91	91
		Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan	Persentase Izin yang Diterbitkan Secara Online	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Pengembangan Kemitraan Pembangunan Kota		Persentase Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Fasilitas Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha	Persentase Proyek KPDBU dengan Orientasi Value for Money	100%	100%	100%	100%

b. Program dan Kegiatan

Pada Renja 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan program yang terdapat di Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 yakni:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
7. Program Pemerintah dan Otonomi Daerah

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				700,288,608,139				721.186.505.411
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	518,338,074,128			4 Indeks	543.145.489.807
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	DKI Jakarta	100%	106,582,360			100%	107,921,496
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	4 Laporan	106,582,360	APBD (PAD)		4 Laporan	107,921,496
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	485,794,786,531			4 Indeks	501.870.306.779
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	100%	485,777,401,031	APBD (PAD)		1317 Orang	501.852.944.159
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	100%	17,385,500	APBD (PAD)		7 Dokumen	17.362.620
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	8,813,002,158			4 Indeks	5.175.046.402

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	143,731,775	APBD (PAD)		1 Paket	168,878,898
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Nilai	4,757,869,270	APBD (PAD)		7 Paket	2,649,540,696
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	163,625,396	APBD (PAD)		1 Paket	197,092,601
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	77,641,080	APBD (PAD)		1 Paket	158,569,272
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta		2,036,300,860	APBD (PAD)		7 Paket	101,674,779
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan		4 Nilai					
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta		1,179,565,290	APBD (PAD)		1 Paket	1,353,307,500
		*Jumlah KDO yang berfungsi/dapat digunakan		370 Unit					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta		77,641,080	APBD (PAD)		7 Laporan	168,297,956
		*Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman		4 Nilai					

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta		279,184,400	APBD (PAD)		2 Laporan	279,150,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta		97,443,007	APBD (PAD)		1 Dokumen	98,534,700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,634,901,225			4 Indeks	17.372.794.205
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Unit	2,609,586,925	APBD (PAD)		1 Unit	11.143.089.534
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta			APBD (PAD)		4 Unit	6.203.734.500
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	80 Unit	25,314,300	APBD (PAD)		80 Unit	25,970,171
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks	3,794,267,445			4 Indeks	2,503,838,718

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta		1,725,165,520	APBD (PAD)		300 Unit	790,951,046
		*Jumlah KDO/KDO Khusus yang dipelihara dan memiliki surat izin		370 Unit					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta		216,814,807	APBD (PAD)		180 Unit	216,806,166
		*Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara		91 Unit					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	1 Unit	93,108,290	APBD (PAD)		1 Unit	50,406,632
		*Nilai kepuasan layanan kebersihan kantor		4 Nilai					
		*Jumlah gedung yang dipelihara		1 Gedung					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta		1,759,178,828	APBD (PAD)		1 Unit	1,445,674,874
		Nilai kepuasan layanan terhadap genset kantor		4 Nilai					
		Jumlah Unit lift yang laik jalan/berfungsi		4 Unit					

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	16,567,940,409			4 Indeks	16.115.582.207
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta		3,557,757,830	APBD (PAD)		4 Laporan	3,488,650,550
		*Persentase penyelesaian administrasi surat-menyurat/caraka dan sopir		100%					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKI Jakarta		3,320,091,600	APBD (PAD)		4 Laporan	3,320,071,927
		*Nilai kepuasan pelayanan Telepon, Air, Listrik dan Internet TALI		4 Nilai					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		2,322,619,200	APBD (PAD)		4 Laporan	2.368.988.640
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi		4 Nilai					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		7,367,471,779	APBD (PAD)		7 Laporan	6.937.871.090
		*Jumlah laporan kinerja petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan		4 Laporan					

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Keamanan Kantor dan Jasa Pembuangan Sampah		4 Nilai					
		*Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		4 Nilai					
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai kemudahan investasi	DKI Jakarta		1,464,613,665			72,5 Nilai	811.000.000
		*Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal		100%					
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu	DKI Jakarta		1,464,613,665				811.000.000
		*Kebijakan penanaman modal yang disusun		1 Kebijakan					
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DKI Jakarta		1,464,613,665	APBD (PAD)		4 Dokumen	811.000.000
		*Jumlah regulasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang disusun		5 Jenis%					

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Laporan Upaya Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif		1 Laporan					
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta -Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	DKI Jakarta, Luar daerah dan Luar Negeri		7,832,139,793			100%	7,888,160,556
		* Indeks kepuasan pelaksanaan promosi daerah		80 Indeks					
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	DKI Jakarta		7,832,139,793			16 Proyek	7,888,160,556
		*Jumlah Laporan terkait potensi investasi di Provinsi DKI Jakarta		1 Laporan					
		*Laporan Efektifitas Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal		1 Laporan					
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	DKI Jakarta, Luar daerah dan Luar Negeri		7,832,139,793	APBD (PAD)		4 Dokumen	7,888,160,556

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Laporan pelaksanaan riset promosi investasi daerah		1 Laporan					
		*Laporan penyelenggaraan Jakarta Investment Center		4 Laporan					
		*Laporan pelaksanaan promosi penanaman modal		4 Laporan					
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	DKI Jakarta		1,518,069,744			60%	1,423,044,972
		*Persentase permasalahan yang dihadapi perusahaan debottlenecking		100 persen					
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DKI Jakarta	2000 Perusahaan	1,518,069,744			12000 Perusahaan	1,423,044,972
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta		897,657,457	APBD (DID)		16 Kegiatan Usaha	545,400,000

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		* Laporan pelaksanaan pengendalian penanaman modal dan Laporan Fasilitas Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta		4 Laporan					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta					422 Pelaku Usaha	172,494,297
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	DKI Jakarta		620,412,287	APBD (PAD)		23 Kegiatan Usaha	705,150,675
		* Laporan pelaksanaan pengendalian penanaman modal dan Laporan Fasilitas Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta		4 Laporan					
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin tepat waktu	DKI Jakarta		154,570,114,145			100%	153,787,305,481
		*Indeks Produktivitas Pelayanan DPMPSTP		84 indeks					
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DKI Jakarta		154,570,114,145			2 Laporan	153,787,305,481

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Persentase terlaksananya Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100 persen					
		*Persentase terlaksananya Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		100 persen					
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta		142,971,356,075	APBD (PAD)	2022 terdiri dari 4 sub kegiatan	11366 Pelaku Usaha	142,139,149,382
		*Laporan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan		4 Laporan					
		*Jumlah laporan pelayanan izin Bidang Ketataruangan		4 Laporan					
		*Laporan peningkatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan		4 Laporan					

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Laporan petugas CRO atas peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu		4 Laporan					
		*Pemberian Bimbingan Teknis Pegawai DPMPTSP		4 Laporan					
		*Jumlah ISO yang diterapkan		1 ISO					
		*Laporan Pelaksanaan Simplifikasi Perizinan dan Non Perizinan		4 Laporan					
		*Jenis peraturan/kebijakan yang disusun dan/atau disempurnakan terkait pelayanan terpadu satu pintu		5 Jenis					
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta		11,598,758,070	APBD (PAD)		73536 Pelaku Usaha	11,648,156,099
		*Laporan pengelolaan call center		4 Laporan					
		*Rasio Berita Positif Terhadap Pelayanan DPMPTSP		9 Rasio					
		*Persentase Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola		100 persen					

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	DKI Jakarta		14,432,469,664			87 Indeks	14,131,504,595
		*Indeks Produktivitas Sistem Data dan Informasi		84 Indeks					
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sistem yang Dikembangkan	DKI Jakarta		14,432,469,664			3 Sistem	14,131,504,595
		Laporan Pengelolaan Sarana dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi Untuk Peningkatan Pelayanan Publik		4 Laporan					
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DKI Jakarta		14,432,469,664	APBD (PAD)		4 Dokumen	14,131,504,595
		Jumlah Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik yang dikembangkan		4 Sistem					

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Persentase sarana dan prasarana TI untuk peningkatan pelayanan publik terkelola dengan baik		100%					
	SEKRETARIAT DAERAH								
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	DKI Jakarta		2,133,127,000			100%	2,047,864,520
		*Laporan persiapan proyek dan atau potensi proyek strategis daerah yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha		4 Laporan					
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Proyek yang Difasilitasi dengan Skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usahan	DKI Jakarta		2,133,127,000			3 Proyek	2,047,864,520
		Laporan Persiapan Proyek dan atau Potensi Proyek Strategis Daerah yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha *		4 Laporan					
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	DKI Jakarta	4 Dokumen	2,133,127,000	APBD (PAD)		4 Dokumen	2,047,864,520

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5,262,915,552				5.179.047.782
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta		5,262,915,552			4 Indeks	5.179.047.782
		*indeks kepuasan pelayanan kantor		4 Indeks					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta		3,750,980,292			4 Indeks	3.678.940.580
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		3,750,980,292	APBD (PAD)		12 Laporan	3.678.940.580
		*Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Pelayanan Administrasi Surat Menyurat / Caraka		4 Poin					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	272,255,742			4 Indeks	471.645.084
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta			APBD (PAD)		58 Unit	233.414.485

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta		272,255,742	APBD (PAD)		364 Unit	238.230.599
		*Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara		322 Unit					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	1,237,292,518				1.026.077.318
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta			APBD (PAD)		1 Paket	98.118.783
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		1,063,503,408	APBD (PAD)		2 Paket	879.259.361
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja serta alat tulis kantor		4 Nilai					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta		49,931,750	APBD (PAD)		1 Paket	27.916.944
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetak dan penggandaan		4 Nilai					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta		123.857.360			1 Laporan	20.782.230

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman		4 Nilai					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	2,387,000				2.384.800 -
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta		2,387,000	APBD (PAD)		1 Dokumen	2.384.800 -
		*Persentase penyelesaian administrasi keuangan		100 persen					
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4,030,501,663				4.066.971.289
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta		4,030,501,663			4 Indeks	4.066.971.289
		*indeks kepuasan pelayanan kantor		4 Indeks					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	1,100,000				1.098.900
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta		1,100,000	APBD (PAD)		4 Dokumen	1.098.900

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Persentase penyelesaian administrasi keuangan		100 persen					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	952,840,818				952.899.016
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		827,688,829	APBD (PAD)		1 Paket	835.208.691
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja serta alat tulis kantor		4 Nilai					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta		51,178,133	APBD (PAD)		1 Paket	51.626.677
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan		4 Nilai					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta		73,973,856	APBD (PAD)		1 Laporan	66.063.648
		*Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman		4 Nilai					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	2,780,899,182				2.727.490.430

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		2,780,899,182	APBD (PAD)		516 Laporan	2.727.490.430
		*Jumlah laporan kinerja petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan		4 Laporan					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	295,661,663				385.482.943 -
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta		295,661,663	APBD (PAD)		295 Unit	143.135.278
		*Nilai Kepuasan Terhadap Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4 Nilai					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta					36 Units	242.347.665
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5,919,863,311				6.131.283.409
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta		5,919,863,311			4 Indeks	6.131.283.409
		*indeks kepuasan pelayanan kantor		4 Indeks					

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	2,005,180				2.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta		2,005,180	APBD (PAD)		1 Dokumen	2.000.000
		*Persentase penyelesaian administrasi keuangan		100 persen					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	1,144,609,158				1.078.919.044
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		794,938,848	APBD (PAD)		2 Paket	822.633.277
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja serta alat tulis kantor		4 Nilai					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta					1 Paket	99.694.983
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta		200,103,750	APBD (PAD)		1 Paket	98.661.018
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetak dan penggandaan		4 Nilai					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta		149,566,560	APBD (PAD)		1 Laporan	38.429.766

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman		4 Nilai					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4 Laporan	19.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	4,527,045,180				4.502.260.700
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		4,527,045,180	APBD (PAD)		4 Laporan	4.502.260.700
		*Jumlah laporan kinerja petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan		4 Laporan					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	246,203,793				548.103.665
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta					67 Unit	308.664.743
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta		246,203,793	APBD (PAD)		180 Unit	239.438.922

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara							
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6,168,056,801				6.706.121.333
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta		6,168,056,801			4 Indeks	6.706.121.333
		*indeks kepuasan pelayanan kantor		4 Indeks					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	1,100,000				1.110.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta		1,100,000	APBD (PAD)		1 Dokumen	1.110.000
		*Persentase penyelesaian administrasi keuangan		100 persen					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	821,176,704				1.140.703.216
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		680,436,709	APBD (PAD)		2 Paket	953.597.287

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja serta alat tulis kantor		4 Nilai					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta					3 Paket	97.552.350
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta		92,026,000	APBD (PAD)		-	-
		*Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman		4 Nilai					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta		48,713,995	APBD (PAD)		1 Paket	57.807.579
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan		4 Nilai					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						11 Laporan	31.746.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	5,238,437,994				5.137.830.810

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		5,238,437,994	APBD (PAD)		12 Laporan	5.137.830.810
		*Jumlah laporan kinerja petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan		4 Laporan					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	107,342,103				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta		107,342,103	APBD (PAD)		332 Unit	203.766.740
		*Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara		245 Unit					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						62 Unit	222.710.567
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6,135,004,973				6.556.150.179
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta		6,135,004,973			4 Indeks	6.556.150.179
		*indeks kepuasan pelayanan kantor		4 Indeks					

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	1,100,000				1.100.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta		1,100,000	APBD (PAD)		1 Dokumen	1.100.000
		*Persentase penyelesaian administrasi keuangan		100 persen					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	803,238,865				1.112.398.962
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta					1 Paket	97.552.350
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta					1 Laporan	27.800.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		740,664,540	APBD (PAD)		2 Paket	921.425.565
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja serta alat tulis kantor		4 Nilai					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta		2,383,645	APBD (PAD)		1 Paket	39.900.726

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan		4 Nilai					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta		60,190,680	APBD (PAD)		1 Laporan	25.720.321
		*Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman		4 Nilai					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	5,238,437,994				5.137.830.810
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		5,238,437,994	APBD (PAD)		4 Laporan	5.137.830.810
		*Jumlah laporan kinerja petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan		4 Laporan					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	92,228,114				304.820.407
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta		92,228,114	APBD (PAD)		110 Unit	66.571.894
		*Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara		146 Unit					

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						60 Unit	238.248.513
UPPMTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1,734,371,668				1.884.384.518
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta		1,174,045,544			4 Indeks	1.264.354.802
		*indeks kepuasan pelayanan kantor		4 Indeks					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	1,500,000				1.500.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta		1,500,000	APBD (PAD)		4 Dokumen	1.500.000
		*Persentase penyelesaian administrasi keuangan		100 persen					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	242,736,439				269.780.128
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		153,178,047	APBD (PAD)		4 Paket	180.285.778

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja serta alat tulis kantor		4 Nilai					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta		48,225,276	APBD (PAD)		5 Paket	48.224.550
		*Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetak dan penggandaan		4 Nilai					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta		41,333,116	APBD (PAD)		4 Laporan	41.269.800
		*Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman		4 Nilai					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	101,282,984				131.751.095
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Unit	101,282,984	APBD (PAD)		4 Unit	131.751.095

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	767,928,628				761.160.120
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta		767,928,628	APBD (PAD)		4 Laporan	761.160.120
		*Jumlah laporan kinerja petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan		4 Laporan					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	60,597,493				100.163.459
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta		60,597,493	APBD (PAD)		4 Unit	100.163.459
		*Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara		91 Unit					
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin tepat waktu	DKI Jakarta		560,326,124			100%	620.029.716
		*Indeks Produktivitas Pelayanan DPMPSTP		84 indeks					
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DKI Jakarta		560,326,124				620.029.716

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		*Persentase terlaksananya Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		100 persen					
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta		560,326,124	APBD (PAD)		4 Pelaku Usaha	620.029.716 9
				TOTAL	728,978,995,983				680,170,849,209

RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



Berdasarkan hasil input pada sistem smart.jakarta.go.id Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 terdiri dari 7 program dan 74 kegiatan sebagai berikut.

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome	Sub Kegiatan	Output (RPD)	Target (RPD)	Pagu Kegiatan Tahun 2023
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	107.921.496
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1317 Orang	501.852.944.159
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	17.362.620
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	168.878.898
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.649.540.696
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	197.092.601
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	158.569.272
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	101.674.779
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.353.307.500
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	168.297.956
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	279.150.000

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome	Sub Kegiatan	Output (RPD)	Target (RPD)	Pagu Kegiatan Tahun 2023
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	98.534.700
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	500 Unit	11.143.089.534
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	6.203.734.500
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.970.171
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit	790.951.046
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit	216.806.166
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	50.406.632
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.445.674.874
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.488.650.550
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3.320.071.927
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.368.988.640
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	6.937.871.090

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome	Sub Kegiatan	Output (RPD)	Target (RPD)	Pagu Kegiatan Tahun 2023
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai kemudahan investasi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	811.000.000
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta -Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	7.888.160.556
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	16 Kegiatan Usaha	545.400.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	23 Kegiatan Usaha	172.494.297
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	422 Pelaku Usaha	705.150.675
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin tepat waktu	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	11366 Pelaku Usaha	142.139.149.382
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	73536 Orang	11.648.156.099

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome	Sub Kegiatan	Output (RPD)	Target (RPD)	Pagu Kegiatan Tahun 2023
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	14.131.504.595
		SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	4 Dokumen	2.047.864.520
2	UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKPUS	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.384.800
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	879.259.361
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	98.118.783
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.916.944
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.782.230
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.678.940.580

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome	Sub Kegiatan	Output (RPD)	Target (RPD)	Pagu Kegiatan Tahun 2023
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	233.414.485
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	364 Unit	238.230.599
3	UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKUT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1.098.900
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	835.208.691
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51.626.677
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	66.063.648
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	516 Laporan	2.727.490.430
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	242.347.665
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	295 Unit	143.135.278
4	UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKBAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	822.633.277

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome	Sub Kegiatan	Output (RPD)	Target (RPD)	Pagu Kegiatan Tahun 2023
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.694.983
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	98.661.018
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	38.429.766
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	19.500.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.502.260.700
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	308.664.743
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	239.438.922
5	UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKSEL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.110.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	953.597.287
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	97.552.350
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	57.807.579
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	31.746.000

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome	Sub Kegiatan	Output (RPD)	Target (RPD)	Pagu Kegiatan Tahun 2023
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.137.830.810
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	222.710.567
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	332 Unit	203.766.740
6	UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKTIM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1,100,000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	921.425.565
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.552.350
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.900.726
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.720.321
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	27.800.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.137.830.810

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome	Sub Kegiatan	Output (RPD)	Target (RPD)	Pagu Kegiatan Tahun 2023
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	238.248.513
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	66.571.894
7	UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN - KEP. SERIBU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1.500.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	180.285.778
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	48.224.550
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	41.269.800
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	131.751.095
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	761.160.120
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	100.163.459
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin tepat waktu	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	4 Pelaku Usaha	620.029.716

PENUTUP



Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2023-2026. Fungsi Dokumen Renja Tahun 2023 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.

Diharapkan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk percepatan pencapaian Sasaran menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPD 2023-2026 dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Jakarta, Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Benni Aguscandra

NIP. 196908081997031004